

**ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI TATA KELOLA PADA  
PT NUSA KONSTRUKSI ENGINERING**



**GUNA MEMENUHI TUGAS UCP KE-1 MATA KULIAH TATA KELOLA DAN ETIKA  
BISNIS**

Dosen: Dr. Ira Geraldina, S.E., Ak., M.S.Ak., CA

**DISUSUN OLEH:**

**KELOMPOK 6**

Rufina Aribrahmani (2010112113)

Saffanah Zerlina Wibowo (2010112122)

Annisa Devina Azzhara (2010112124)

Dwi Fitri Ramadhanti (2010112125)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

2021

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

### 1. Judul Project

“Analisis Efektifitas Implementasi Tata Kelola pada PT. Nusa Konstruksi Enjiniring”

### 2. Tim Project

No.	Nama	Jabatan	Fakultas/Prodi	Tugas
1.	Rufina Aribrahmani	Anggota Kelompok	FEB/S1 Akuntansi	Mencari materi, membuat PPT, dan membuat video bagian efektivitas <i>board</i> dalam penerapan GCG PT NKE, serta menyatukan video kelompok.
2.	Saffanah Zerlina Wibowo	Anggota Kelompok	FEB/S1 Akuntansi	Mencari materi, membuat PPT, dan membuat video bagian profil perusahaan PT NKE, serta membuat dan merekap tabel laporan kegiatan anggota kelompok.
3.	Annisa Devina Azzahra	Anggota Kelompok	FEB/S1 Akuntansi	Mencari materi, membuat PPT, dan membuat video bagian implementasi dan masalah efektivitas GCG PT NKE, serta merekap

				daftar hadir kegiatan anggota kelompok.
4.	Dwi Fitri Ramadhanti	Anggota Kelompok	FEB/S1 Akuntansi	Mencari materi, membuat PPT, dan membuat video bagian efektivitas penerapan prinsip GCG PT NKE, serta menyatukan berkas laporan kegiatan, <i>logbook</i> , dan daftar hadir ke dalam satu berkas.

## **KATA PENGANTAR**

Puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pembuatan makalah kami yang berjudul “Analisis Efektivitas Implementasi Tata Kelola pada PT Nusa Konstruksi Enjiniring”. Karya tulis ini berhasil kami selesaikan dengan baik tanpa adanya hambatan yang berarti.

Karya tulis ini dapat kami selesaikan dengan baik mulai dari awal penyusunan, penelitian, hingga penyusunan akhir yang tentu tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Ira Geraldina, S.E., Ak., M.S.Ak., CA. selaku dosen mata kuliah Tata Kelola dan Etika Bisnis yang telah memberikan tugas serta bimbingannya dalam menyelesaikan makalah ini. Selain itu, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi dalam penyelesaian makalah ini.

Di luar itu, kami segenap penulis hanyalah manusia biasa dan sadar sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami meminta maaf atas segala kesalahan. Kami sangat terbuka dalam menerima kritik serta saran yang membangun dari para pembaca.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Harapan kami, semoga makalah ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi para pembaca.

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>IDENTITAS DAN URAIAN UMUM.....</b>	i
1. Judul Project.....	i
2. Tim Project.....	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Pembahasan.....	2
<b>BAB II ISI.....</b>	3
2.1. Profil PT Nusa Konstruksi Enjiniring .....	3
A. Penerapan Prinsip Tata Kelola .....	4
B. Tujuan Penerapan GCG .....	4
C. Kronologi PT Nusa Konstruksi Enjiniring.....	5
D. Struktur CG .....	6
2.2. Efektivitas Penerapan Corporate Governance.....	9
A. Prinsip Good Corporate Governance (GCG) .....	9
B. Pelanggaran Prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT NKE .....	11
2.3. Analisis Implementasi dan Masalah Efektivitas Corporate Governance .....	12
A. Stakeholder Theory .....	12
B. Stewardship Theory.....	13
2.4. Analisis Efektifitas Boards dalam Penerapan GCG PT NKE.....	14
A. <i>Director</i> .....	14
B. <i>Board of Committee</i> .....	14
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	16

3.1. Kesimpulan.....	16
3.2. Rekomendasi .....	16
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
<b>DAFTAR HADIR ANGGOTA KELOMPOK.....</b>	<b>18</b>
<b>LOGBOOK KELOMPOK 6.....</b>	<b>18</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Topik dan isu-isu mengenai prinsip Good Corporate Governance semakin penting untuk dibahas dalam perusahaan saat ini. Sebab, penerapan prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan dan juga mempermudah tercapainya tujuan perusahaan. Selain itu, penerapan prinsip Good Corporate Governance akan membuat para investor semakin yakin untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan karena mereka yakin bahwa perusahaan tersebut dapat menjalankan perusahaan dengan baik dan benar, memiliki kualitas yang tinggi, dan memiliki organ perusahaan yang memiliki kinerja yang baik.

Daniri (2014, p.9) menyatakan Good Corporate Governance adalah sebuah aturan yang memberikan tata cara tentang bagaimana peranan tiap organisasi perusahaan, baik pemegang saham, dewan direksi, maupun dewan komisaris dengan hasil akhir, yaitu untuk mendulang nilai positif yang ditujukan kepada pemegang saham ataupun pemangku kepentingan perusahaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), terdapat 5 prinsip terkait dengan Good Corporate Governance. Kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness (kesetaraan dan kewajaran).

Namun pada kenyataannya, saat ini masih banyak perusahaan yang melanggar prinsip dari Good Corporate Governance. Hal tersebut terjadi karena masih lemahnya pengendalian internal di perusahaan dan lemahnya penerapan prinsip Good Corporate Governance di dalam perusahaan tersebut. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai kecurangan yang hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Salah satu contoh dari pelanggaran penerapan prinsip Good Corporate Governance adalah kasus PT Nusa Konstruksi Enjiniring yang melakukan suap kepada pejabat terkait agar perusahaan mereka dapat memenangkan proyek pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas pelanggaran prinsip Good Corporate Governance pada PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE).

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana profil dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring?
2. Bagaimana kronologi dari kasus GCG pada PT Nusa Konstruksi Enjiniring?
3. Bagaimana efektivitas penerapan Corporate Governance pada PT Nusa Konstruksi Enjiniring?
4. Bagaimana implementasi dan masalah efektivitas Corporate Governance pada PT Nusa Konstruksi Enjiniring?

## **1.3 Tujuan Pembahasan**

1. Untuk mengetahui profil dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring.
2. Untuk mengetahui kronologi dari kasus GCG pada PT Nusa Konstruksi Enjiniring.
3. Untuk mengetahui efektivitas penerapan Corporate Governance pada PT Nusa Konstruksi Enjiniring.
4. Untuk Mengetahui implementasi dan masalah efektivitas Corporate Governance pada PT Nusa Konstruksi Enjiniring.

## BAB II ISI

### 2.1. Profil PT Nusa Konstruksi Enjiniring

PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk (NKE) didirikan pada tanggal 11 Januari 1982 dengan menggunakan nama PT Duta Graha Indah. Perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi, energi, pertambangan, dan real estate (properti). Perusahaan ini mulai terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 Desember 2007 dengan kode saham DGIK. PT NKE beralamat di ITS Office Tower (Nifarro Park) Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 Jakarta Selatan. PT NKE mendirikan anak perusahaan bernama PT Inti Duta Energy yang difokuskan pada bisnis usaha energi, terutama energi terbarukan, dan mendirikan anak perusahaan bernama PT Duta Buana Permata yang difokuskan pada bisnis usaha pengembangan properti. PT NKE, melalui kerja sama joint venture, bersama PT Macmahon Mining Service melakukan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan. Pada tahun 2012 perusahaan ini mengganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk yang menandai restrukturisasi perseroan, termasuk strategi baru perseroan yang berfokus pada diversifikasi ke sektor energi dan sektor swasta.

Visi dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring adalah menjadi perusahaan yang unggul dalam melakukan diversifikasi bisnis konstruksi, enjiniring, dan investasi di Indonesia. Perusahaan ini juga memiliki 5 misi, yaitu:

1. Mengembangkan organisasi yang selalu melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan.
2. Mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) dan memaksimalkan kepentingan dari *stakeholders*.
3. Selalu melakukan inovasi-inovasi baru terhadap potensi bisnis untuk meningkatkan kinerja dan profitabilitas.
4. Menjadi pelopor pengembangan metode kerja, peralatan, teknologi, dan sistem manajemen yang terintegrasi dalam bisnis konstruksi.
5. Menciptakan sinergi strategis dengan vendor, mitra bisnis, dan klien.

## A. Penerapan Prinsip Tata Kelola

Untuk mempersiapkan diri dari adanya perubahan lingkungan bisnis yang kompetitif, menciptakan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, dan menentukan peran dan akuntabilitas yang jelas bagi seluruh karyawan di setiap tingkat organisasi, PT NKE berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas penerapan praktik terbaik *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya. Terdapat 5 (lima) prinsip GCG yang diterapkan perseroan, yaitu sebagai berikut.

- Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- Kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan.

## B. Tujuan Penerapan GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG akan meningkatkan citra dan kinerja perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Di samping itu, tujuan lain dari diterapkannya prinsip GCG di lingkungan perseroan adalah sebagai berikut.

1. Mengoptimalkan nilai perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara Nasional maupun Internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan.
2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan.

3. Mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan ataupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan.
4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian Nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi Nasional.

### **C. Kronologi PT Nusa Konstruksi Enjiniring**

Pada 24 Juli 2017, Komisi Pemberantas Korupsi menetapkan PT NKE sebagai tersangka. Perusahaan ini dijerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009–2010. Penetapan perusahaan ini sebagai tersangka merupakan pengembangan penyidikan perkara yang sama dengan tersangka Dudung Purwadi, Direktur Utama PT DGI, dan Made Meregawa, pejabat pembuat komitmen. Saat perusahaan ini diseret ke meja hijau, PT NKE didakwa memperkaya korporasi sendiri senilai ratusan miliar rupiah dalam proyek pemerintah.

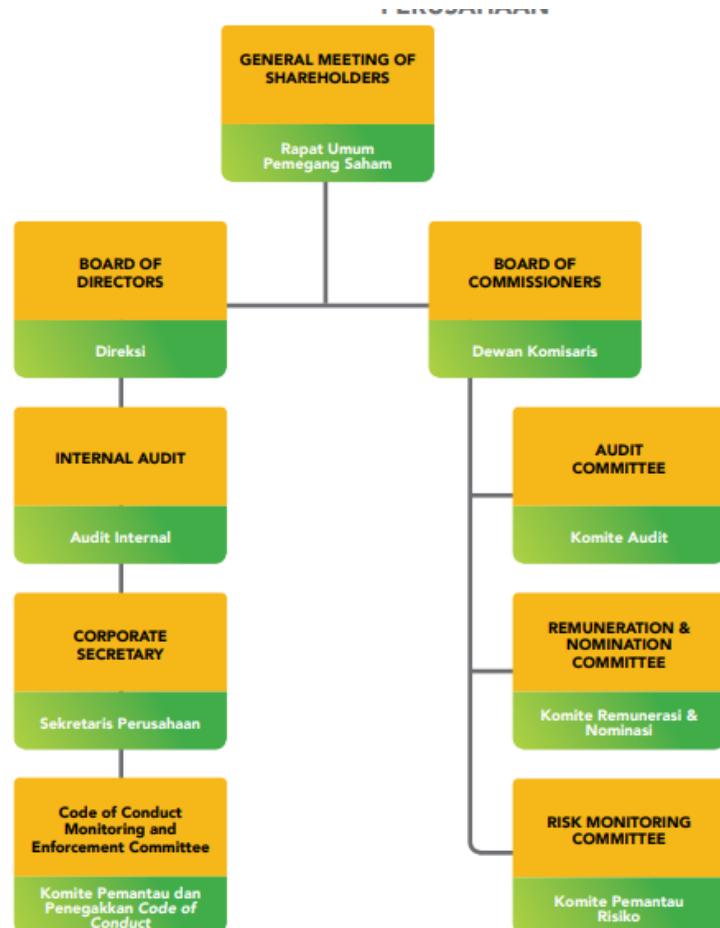
Perbuatan tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp25,953 miliar. PT NKE didakwa melawan hukum dengan membuat kesepakatan untuk memenangkan perusahaannya dalam lelang proyek Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010. PT NKE juga dinilai memperkaya diri sendiri atau selaku korporasi sejumlah Rp24,778 miliar. Atas perbuatannya, jaksa KPK menuntut PT NKE membayar pidana denda sebesar Rp1 miliar. PT NKE juga dituntut pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp188.732.756.416. Selain itu, jaksa juga mencabut hak PT NKE untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama dua tahun.

PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) divonis membayar pidana denda sebesar Rp700 juta. PT NKE juga dipidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp85.490.234.737. selanjutnya, majelis hakim mencabut hak perusahaan untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama enam bulan. Direktur Utama PT NKE Djoko Eko Suprastowo menerima putusan hakim, yaitu pencabutan hak mengikuti lelang proyek pemerintah. Direktur utama PT NKE juga mengatakan akan menjual

sebagian saham dan aset perusahaan untuk membayar pidana uang pengganti sekitar Rp85 miliar.

#### D. Struktur CG

Struktur Tata Kelola dan Kebijakan Perusahaan pada PT NKE terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris, Audit Internal, Sekretaris perusahaan, Komite Audit, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.



#### RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memiliki wewenang tertinggi yang tidak diberikan kepada dewan komisaris maupun direksi. RUPS menjadi forum yang sah bagi dewan komisaris dan direksi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kinerja mereka kepada para pemegang saham. Pada tahun 2016, PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 2 Juni 2016 bertempat di Hotel Ritz

Carlton Pacific Place Jakarta. Pada tanggal 15 Desember 2016, perseroan kembali mengadakan RUPS Luar Biasa di Hotel Grandhika Iskandarsyah Jakarta.

### **Dewan Komisaris**

Dewan komisaris merupakan salah satu bagian dari organ perseroan yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pengelolaan yang dilaksanakan oleh direksi beserta jajarannya. Secara umum, dewan komisaris merupakan salah satu organ penyeimbang agar berjalannya kegiatan usaha sesuai dengan Anggaran Dasar dan standar yang telah ditetapkan. PT NKE memiliki 1 komisaris utama, 2 komisaris independen, dan 2 komisaris. Sepanjang tahun 2017, Dewan Komisaris PT NKE telah melakukan rapat rutin mingguan/bulanan sebanyak 11 kali.

Name / Nama	Position / Jabatan	Total Meeting / Jumlah Rapat	Total Attendance / Jumlah Kehadiran	%
Latief Effendi Setiono	President Commissioner / Komisaris Utama	11	11	100
Soehandjono	Independent Commissioner / Komisaris Independen	11	11	100
Bambang Sulistomo*	Independent Commissioner / Komisaris Independen	3	3	100
Roy Edison Maningkas	Commissioner / Komisaris	11	5	45,45
Rony N. Hendropriyono*	Commissioner / Komisaris	3	2	66,66

\*has been serving as the Board of Commissioners since October 5, 2017.

\*menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak 5 Oktober 2017.

### **Direksi**

Sebagai bagian dari organ perseroan, Direksi berperan dalam menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan kepengurusan perseroan sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif. Namun, masing-masing direktur diberi hak untuk bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan wewenangnya. PT NKE memiliki 1 direktur utama, 1 direktur independent, 2 direktur. Sepanjang tahun 2017, direksi telah melakukan rapat rutin mingguan/bulanan sebanyak 35 kali.

Name / Nama	Position / Jabatan	Total Meeting / Jumlah Rapat	Total Attendance / Jumlah Kehadiran	%
Djoko Eko Suprastowo	President Director / Direktur Utama	35	23	65.71
Ganda Kusuma	Director / Direktur	35	35	100
Budi Susilo Sadiman*)	Director / Direktur	7	7	100
Harry Soesilo Alim	Independent Director / Direktur Independen	35	29	82.8

\*) efektif terhitung setelah pengangkatan beliau pada RUPS LB 2 Juni 2017

\*) effective since his appointment through the EGMS on June 2, 2017

### **Komite Audit**

Komite audit merupakan salah satu organ pendukung dewan komisaris yang memiliki tugas utama dalam membantu mengefektifkan fungsi pengawasan yang dijalankan dewan komisaris terhadap kinerja direksi dalam mengelola perseroan, khususnya berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, meningkatkan efektivitas fungsi audit baik internal maupun eksternal, penerapan pengelolaan risiko serta ketaatan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. PT NKE memiliki 1 ketua komite audit dan 4 anggota komite audit. Pada tahun 2017, komite audit telah melakukan rapat rutin mingguan/bulanan sebanyak 5 kali.

Name / Nama	Position / Posisi	Total Meeting / Jumlah Rapat	Total Attendance / Jumlah Kehadiran	%
Soehandjono	Audit Committee Chairman / Ketua Komite Audit	5	5	100
Latief Effendi Setiono	Audit Committee Member / Anggota Komite Audit	5	5	100
J. L. P. Damar	Audit Committee Member / Anggota Komite Audit	5	5	100
Arry Syarief	Audit Committee Member / Anggota Komite Audit	5	5	100
Soenarso Soemodiwirjo	Audit Committee Member / Anggota Komite Audit	5	5	100

### **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite nominasi dan remunerasi dibentuk oleh dewan komisaris dan memiliki peran dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota dewan komisaris dan direksi serta sistem remunerasinya. PT NKE memiliki 4 komite remunerasi dan nominasi yang terdiri dari 1 ketua dan 3 anggota. Pada tahun 2017, komite ini telah melakukan rapat internal sebanyak 8 kali

Name / Nama	Position / Jabatan	Total Meeting / Jumlah Rapat	Total Attendance / Jumlah Kehadiran	%
Bambang Sulistomo	Chairman / Ketua	2	2	100
Latief Effendi Setiono	Member / Anggota	2	2	100
Gunawan	Member / Anggota	2	2	100
Wasito Adi	Member / Anggota	2	2	100

### **Dasar Hukum Pembentukan**

Dewan komisaris membentuk komite nominasi dan remunerasi berdasarkan Peraturan OJK No. 34/ POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan Publik.

### **Tugas dan Tanggung Jawab**

Perseroan memiliki komite nominasi dan remunerasi yang memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

a. Fungsi Nominasi:

1. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris,
  - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi,
  - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS

b. Fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - struktur Remunerasi
  - kebijakan atas Remunerasi
  - besaran atas Remunerasi
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugasnya, komite remunerasi dan nominasi bersifat independen. Artinya, mereka tidak memiliki hubungan dengan satu sama lain ataupun hubungan kerja dengan dewan komisaris atau direksi ataupun benturan kepentingan yang mampu menurunkan kualitas kinerja.

## 2.2. Efektivitas Penerapan Corporate Governance

### A. Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Penerapan *corporate governance* yang baik berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip-prinsip dalam GCG, di antaranya yaitu:

1. *Fairness* (Kewajaran dan Kesetaraan)

Kewajaran dan kesetaraan meliputi perlakuan yang wajar dan setara dalam memenuhi hak pemangku kepentingan sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini dapat dijalankan salah satunya dengan direktur memberikan para pemegang saham perlakuan wajar, seperti satu vote per satu lembar saham dan hak atas dividen yang sama juga, yaitu per lembar saham. Hal ini didukung oleh hukum proteksi pemegang saham minoritas.

## 2. *Transparency* (Keterbukaan)

Transparansi atau keterbukaan terjadi saat tidak ada informasi yang ditutupi dalam pengambilan keputusan guna mencapai tujuan. Transparansi juga diperlukan dalam aksesibilitas terhadap informasi material dan relevan. Hal ini berarti perusahaan menyediakan informasi terkait apa yang telah dan akan dilakukan serta risiko yang dihadapi.

## 3. *Independence* (Independensi)

Independensi terkait dengan pengelolaan secara profesional, tidak adanya benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagian besar direksi perusahaan seharusnya independen sehingga dapat memberi keputusan dan opini terbaik untuk kepentingan perusahaan tanpa bias atau ide yang dicekoki sebelumnya.

## 4. *Honesty and Integrity* (Kejujuran dan Integritas)

Kejujuran dan integritas adalah karakter yang esensial bagi direksi. Perusahaan tidak boleh memutar balikkan atau memanipulasi fakta demi menunjukkan sisi atau tujuan pribadi yang diinginkan. Masih berhubungan dengan kejujuran, integritas berarti berperilaku sesuai dengan standar yang tinggi dan moral yang ketat.

## 5. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Responsibility atau tanggung jawab adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap prinsip perusahaan yang sehat dan peraturan yang berlaku. Dewan direksi bertanggung jawab pada keputusan-keputusan strategis, seperti tujuan strategis dan pengesahan investasi kapital yang besar.

## 6. *Accountability* (Akuntabilitas)

Prinsip akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan prosedur organ perusahaan untuk memastikan manajemen dijalankan secara efektif.

## B. Pelanggaran Prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT NKE

Dalam kasus ini, PT NKE telah melanggar beberapa prinsip Good Corporate Governance sebagai berikut.

### 1. *Transparency* (Keterbukaan)

PT NKE melanggar prinsip transparansi karena:

- PT NKE melanggar prinsip keterbukaan karena Dudung Purwadi selaku Direktur Utama PT Nusa Konstruksi Enjiniring bersama dengan Mohammad El Idris selaku Wakil Direktur Marketing PT NKE meminta bantuan kepada Muhammad Nazaruddin selaku anggota DPR dan panitia tender proyek pembangunan untuk memenangkan lelang proyek pembangunan dari pemerintah..
- PT NKE harus memenuhi syarat, yaitu memberi *fee* kepada Muhammad Nazaruddin sebesar 15% dari nilai *rill cost* kontrak.
- PT NKE memberikan fee melalui perusahaan yang dikendalikannya, seperti PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara, PT Grup Permai dengan cara seolah-olah perusahaan-perusahaan tersebut merupakan subkontrak PT NKE atau menerima pembayaran atas material yang dibeli oleh PT NKE.

### 2. *Honesty and Integrity* (Kejujuran dan Integritas)

PT NKE melakukan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan integritas disebabkan oleh:

- PT NKE menyatakan pekerjaan telah selesai berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada pembangunan tahap II. PT NKE menyatakan pekerjaan telah selesai 100% di saat proyek baru terealisasikan sebesar 57,49% setelah ditelusuri oleh ahli ITB dilihat dari segi konstruksi dan kualitas bangunan.
- Dengan PT NKE yang menyalurkan *fee* kepada Muhammad Nazaruddin melalui perusahaan yang dikendalikannya, seperti PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara, PT Grup Permai melalui alasan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut merupakan subkontrak PT NKE atau menerima pembayaran atas material yang dibeli oleh PT NKE, itu membuktikan

bahwa PT NKE tidak menjunjung nilai kejujuran.

- Kecurangan dan kebohongan yang dilakukan PT NKE mengartikan bahwa mereka juga melanggar prinsip integritas karena tidak berperilaku dengan standar yang tinggi secara profesional dan moral yang kuat.

### 3. *Independence* (Independensi)

Pelanggaran prinsip independensi terjadi dengan tersalurkannya *fee* dari PT NKE ke Muhammad Nazaruddin menggunakan alasan yang dibuat-buat untuk menutupi kecurangan. Ini berarti telah terjadi kesepakatan antara pihak-pihak tersebut untuk melancarkan aksi korupsi. Adanya kerja sama ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan tidak memegang prinsip independensi sebagaimana perusahaan yang baik seharusnya dijalankan.

### 4. *Fairness* (Kewajaran)

Kebohongan PT NKE yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Kecurangan perusahaan dalam memenangkan lelang dan kebohongan ini menjadi bukti bahwa PT NKE melanggar prinsip *fairness* karena hanya ingin menguntungkan perusahaan dan pihak yang terlibat dalam kasus serta berperilaku tidak wajar tanpa memikirkan kerugian yang didapat pihak lain, seperti negara.

### 5. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PT NKE menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki tanggung jawab yang baik dalam implementasi GCG (Good Corporate Governance). Tindak korupsi pada PT NKE mengartikan adanya ketidaksesuaian pengelolaan perusahaan terhadap prinsip yang sehat dan peraturan yang berlaku atau dengan arti lain tidak sejalan dengan implementasi prinsip *responsibility*.

## 2.3. Analisis Implementasi dan Masalah Efektivitas Corporate Governance

### A. Stakeholder Theory

Teori *stakeholder* adalah teori yang menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi para stakeholder secara lebih luas (Ghozali dan Chariri, 2007:409) dalam Fadhil (2016:2). Menurut Hadi (2011:93) dalam Ratnasari & Meita (2017:203), *stakeholder* adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki

hubungan baik bersifat mempengaruhi ataupun dipengaruhi, bersifat langsung ataupun tidak langsung pada perusahaan. Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *stakeholder theory* merupakan teori yang menegaskan bahwa segala kegiatan yang dilakukan perusahaan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kepentingan dari manajemen perusahaan, tetapi juga untuk memenuhi kepentingan stakeholder baik internal maupun eksternal yang secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan.

Berdasarkan kasus PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, diketahui bahwa PT. NKE telah berbohong mengenai penyelesaian proyek pembangunan RS khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana anggaran tahun 2009-2010. Dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I dan II, PT NKE menyatakan bahwa pekerjaan proyek telah selesai 100%. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh para ahli ITB, dilihat dari konstruksi dan kualitas bangunan, proyek ini baru terealisasi sekitar 67,03% dan 57,49%. Akibat hal tersebut, negara mengalami kerugian sebesar 25, 953 miliar.

Dari penjelasan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa PT. NKE hanya mementingkan kepentingan manajemen perusahaannya saja yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut tetapi tidak mementingkan kepentingan dari beberapa stakeholder seperti pemerintah, di mana pada kasus ini negara mengalami kerugian sebesar 25,953 miliar.

## B. Stewardship Theory

Menurut Donaldson & Davis (1989, 1991), teori *stewardship* adalah teori yang menjelaskan situasi di mana manajer memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Dalam teori *stewardship*, manajer akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama di mana seorang manajer didorong untuk mengutamakan kepentingan perusahaan dan membuat public yakin dan percaya terhadap perusahaan yang dijalani.

Berdasarkan kasus di atas, PT NKE diketahui memang ingin memperkaya perusahaan dari proyek yang dijalani tetapi tindakan yang dilakukan salah karena PT NKE diketahui telah melakukan tindakan korupsi yaitu dengan melakukan penyuapan kepada Muhammad Nazaruddin selaku anggota DPR dan panitia dari tender proyek tersebut. Muhammad Nazaruddin memberikan syarat kepada PT NKE untuk memberikan fee sebesar 15% dari nilai *rill cost* kontrak agar PT NKE mendapat proyek

pembangunan dari pemerintah tersebut. Dampak dari kasus tersebut, perusahaan pun akhirnya harus membayar denda sebesar Rp700 juta, tidak diizinkan untuk mengikuti proyek lelang pemerintah selama 6 bulan. Selain itu, perusahaan mendapatkan kesan yang buruk akibat dari kasus tersebut salah satunya adalah kepercayaan bank yang menurun terhadap perusahaan.

## **2.4. Analisis Efektifitas Boards dalam Penerapan GCG PT NKE**

### ***A. Director***

Dalam sebuah organisasi, peran direksi adalah menjalankan semua tindakan yang memiliki keterkaitan dengan kepengurusan perseroan yang sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Direksi juga memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolektif, namun masing-masing direktur diberi hak untuk bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan wewenangnya.

Dengan adanya kejadian korupsi, peran boards dalam penerapan GCG PT NKE dinilai kurang efektif. Dari sisi direksi, orang yang memegang posisi ini diharuskan menjadi seseorang yang profesional dalam menjalankan tugasnya, yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Tetapi, direksi PT NKE tidak menunjukkan keprofesionalannya dalam menjalankan tugasnya karena justru memperkaya korporasi dengan cara korupsi. Tersangka tindakan korporasi merupakan Dudung Purwadi (DPW) mantan Direktur Utama PT DGI dan Made Meregawa.

### ***B. Board of Committee***

Secara umum bahwa dapat bekerja secara tepat guna dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks Dewan Komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada komite-komite. Berdasarkan praktek yang umum berlaku di dunia internasional, disarankan bahwa anggota komite-komite tersebut diisi oleh anggota Komisaris Independen.

Keberadaan komite menjadi suatu sistem yang bermanfaat untuk dapat melaksanakan pekerjaan Dewan Komisaris secara lebih rinci dengan memusatkan perhatian Dewan Komisaris kepada bidang khusus perusahaan atau cara pengelolaan yang baik (Governance) oleh manajemen. Dewan Komite PT NKE tidak menjalankan

tugasnya dengan baik karena salah satu pengelola perusahaan yaitu direksi, malah melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pemerintah untuk membangun rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana. Dewan Komite juga gagal untuk membuat PT NKE menaati etika sekaligus tanggung jawab sosial untuk membantu memajukan kesehatan Indonesia.

## BAB III PENUTUP

### 3.1. Kesimpulan

1. Pada tanggal 24 Juli 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan PT NKE sebagai tersangka. Perusahaan ini dijerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010. Dampak dari kasus tersebut, PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) divonis membayar pidana denda sebesar Rp 700 juta. PT NKE juga dipidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 85.490.234.737. Majelis hakim juga mencabut hak perusahaan untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama enam bulan.
2. Kasus korupsi yang terjadi pada PT NKE memberikan kesan buruk bagi perusahaan. 13 hari setelah penetapan sebagai tersangka oleh kpk mengakibatkan Bursa Efek Indonesia membekukan saham aktivitas jual beli saham PT NKE. Selain itu, kepercayaan bank terhadap perusahaan ini menjadi menurun. Permasalahan yang terjadi menyebabkan perusahaan ini mengalami banyak kerugian dan telah melanggar prinsip-prinsip good corporate governance.

### 3.2. Rekomendasi

1. Perusahaan perlu membenahi manajemen dan menyusun sistem yang paten disertai peraturan dan keamanan yang ketat agar kecurangan-kecurangan sekecil apa pun tidak terjadi. Perusahaan juga hendaknya menerapkan moral yang baik pada diri masing-masing agar memiliki kesadaran tinggi untuk dapat berlaku sesuai prinsip yang sehat sehingga GCG terimplementasikan.
2. Perusahaan perlu memikirkan secara matang setiap keputusan yang akan dibuat agar keputusan tersebut tidak hanya menguntungkan beberapa pihak saja tetapi juga semua pihak yang terlibat. Selain itu, perusahaan juga harus bisa mengambil suatu tindakan yang benar dan selalu mempertimbangkan resiko dari setiap tindakan yang akan dilakukan.
3. Boards of Committee perusahaan perlu meningkatkan pengawasannya terhadap direksi. Jika direksi sudah mulai menunjukkan sikap tidak profesional yang mengarah kepada perbuatan korupsi, sebaiknya segera diganti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Annual Report PT Nusa Konstruksi Enjiniring 2017
2. Kompas.com. (2019). Perjalanan Kasus PT NKE Korporasi Pertama yang Divonis Korupsi. Diakses Sabtu, 11 September 2021.  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/01/04/06115311/perjalanan-kasus-pt-nke-korporasi-pertama-yang-divonis-korupsi?page=all>
3. Chan, L.C. (2019). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada PT Sumber Baru Wisata. *Agora*, 7(1)
4. Fadhil, Muhammad. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris Independen, dan Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility (CSR). Artikel Ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas. Surabaya
5. Indriyani, N.M.V., dan I Wayan Gde. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance dan Budaya Tri Hita Karana sebagai Variabel Moderasi pada Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal KRISNA*, 11(2), 164-169
6. Raharjo, Eko. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1), 37-46
7. Ratnasari, Niki, dan Iren Meita. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 201-2014
8. Zulva, Khafifah. (2021). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh PT.Nusa Konstruksi Enjiniring. Skripsi. Universitas Andalas. Padang
9. Perbedaan Antara Board of Director, Board Committes, Board Power dan Board Composition Dalam Implmentasiko Konteks Good Corporat Governance di Indonesia. Diakses Sabtu, 17 September 2021.  
<https://farizadlanblog.wordpress.com/2017/03/27/perbedaan-antara-board-of-director-board-committes-board-power-dan-board-composition-dalam-implmentasiko-konteks-good-corporat-governance-di-indonesia/>

## DAFTAR HADIR ANGGOTA KELOMPOK

Nama	Pertemuan ke-1 (Group Chat)	Pertemuan ke-2 (Group Chat)	Pertemuan ke-3 (Group Chat)	Pertemuan ke-4 (Group Chat)	Pertemuan ke-5 (Google Meet)	Pertemua n ke-6 (Group Chat)	Pertemua n ke-7 (Zoom Meeting)
Rufina Arribarrahmani	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Saffanah Zerlina Wibowo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Annisa Devina Azzahra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dwi Fitri Ramadhanti	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## LOGBOOK KELOMPOK 6

No.	Nama	Kegiatan	Waktu	Dokumentasi
1.	Rufina Aribarrahmani (2010112113)	Mencari dan merangkum materi yang sesuai dengan “Analisis Efektifitas dalam Penerapan GCG PT NKE”	Rabu, 8 September 2021	
2.	Saffanah Zerlina Wibowo (2010112122)	Mencari materi dan menambahkan materi ke paper	Rabu, 8 September 2021	

3.	Annisa Devina Azzahra (2010112124)	Mencari materi dan menambahkan materi ke paper	Minggu, 12 September 2021	
4.	Saffanah Zerlina Wibowo (2010112122)	Membuat progress power point bagian profil perusahaan PT NKE	Minggu, 12 September 2021	
5.	Annisa Devina Azzahra (2010112124)	Membuat power point bagian orientasi/dasar teori yang mendasari implementasi GCG pada objek	Minggu, 12 September 2021	
6.	Rufina Aribarrahmani (2010112113)	Menaruh materi mengenai “Analisis Efektifitas dalam Penerapan GCG PT NKE” yang sudah ditemukan dan dirangkum ke <i>Power Point</i>	Minggu, 12 September 2021	
7.	Dwi Fitri Ramadhanti (2010112125)	Membuat progress power point bagian efektivitas penerapan <i>corporate governance</i>	Minggu, 12 September 2021	
8.	Saffanah Zerlina Wibowo (2010112122)	Merapikan Power Point bagian profil perusahaan PT NKE	Kamis, 16 September 2021	

9.	Rufina Aribarhmani (2010112113)  Saffanah Zerlina Wibowo (2010112122)  Annisa Devina Azzahra (2010112124)  Dwi Fitri Ramadhanti (2010112125)	Membuat video koordinasi kelompok	Jumat, 17 September 2021	
10.	Saffanah Zerlina Wibowo (2010112122)	Membuat vidio paparan presentasi bagian profil perusahaan PT NKE	Jumat, 17 September 2021	
11.	Annisa Devina Azzahra (2010112124)	Membuat video paparan presentasi bagian orientasi/dasar teori yang mendasari implementasi GCG pada objek	Jumat, 17 September 2021	
12.	Rufina Aribarhmani (2010112113)	Menaruh materi yang sudah ditemukan dan dirangkum ke <i>Paper</i>	Jumat, 17 September 2021	

13.	Dwi Fitri Ramadhanti (2010112125)	Menulis dan melengkapi materi yang telah ditemukan ke <i>Paper</i>	Jumat, 17 September 2021	
14.	Dwi Fitri Ramadhanti (2010112125)	Membuat video paparan bagian efektivitas penerapan <i>corporate governance</i>	Jumat, 17 September 2021	
15.	Rufina Aribarahmani (2010112113)	Membuat video paparan	Sabtu, 18 September 2021	
16.	Dwi Fitri Ramadhanti (2010112125)	Menyatukan dan merapikan berkas-berkas ke dalam satu berkas	Sabtu, 18 September 2021	

Link pengumpulan video kelompok 6:

<https://drive.google.com/drive/folders/1Y4fO3eLIjM6yJ021r224TsixeveSZse0>